

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI PENGANGGURAN
DI KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh:

**Rezky Wulan Ramadhani
NIM. 170602117**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rezky Wulan Ramadhani
NIM : 170602117
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2022
Yang menyatakan,

Rezky Wulan Ramadhani



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di
Kota Banda Aceh Dalm Perspektif Ekonomi Islam**

Disusun Oleh:

Rezky Wulan Ramadhani

NIM. 170602117

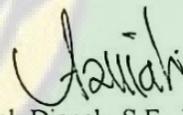
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi
dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



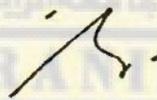
Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN.0106077507

Pembimbing II



Azimah Dianah, S.E., M.Si, AK
NIDN.2026028803

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rezky Wulan Ramadhani
NIM. 170602117

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Banda Aceh

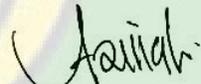
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



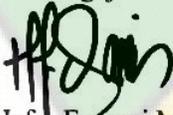
Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN.0106077507

Sekretaris



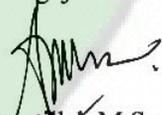
Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIDN.2026028803

Penguji I



Dr. Hafas Fargani, M.Ec
NIP.198006252009011009

Penguji II

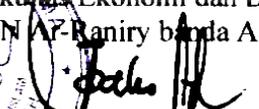


Dara Amanatillah, M.Sc. Fin
NIDN.2022028705



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rezky Wulan Ramadhani
NIM : 170602117
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail : rezkywulanramadhani103@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Kebijakan Pemerintahan Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2022M/ 1443 H*

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rezky Wulan Ramadhani
NIM. 170602117

Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN.0106077507

Azimah Dianah, S.E., M.Si, Ak
NIDN.2026028803

LEMBAR MOTO PERSEMBAHAN

قُلْ
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 6)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah : 286)

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ - يُرَى سَوْفَ سَعِيهِ وَأَنَّ

*“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan,
dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya”*
(Q.S. An-Najm ayat 39-40)

Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah. Semua dosen/guru dan fakultas/kampus yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Shalawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kealam yang islamiyah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Khairul Amri, S.E., M.Si dan Azimah Dianah, S.E., M.Si. Ak Selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran, serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Dr.Hafas Furqani,M.Ec selaku penguji I dan Dara Amanatillah,M.Sc.Fin selaku penguji II yang telah banyak memberi pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan untuk perbaikan.
6. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si, Ak., selaku penasehat akademik (PA) peneliti selama proses menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, Terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muchtar Jamil dan Ibunda Dwi Murni SN yang telah mendoakan dan mendukung, selama proses perskripsian ini.
8. Untuk saudari kandung, kakak – kakak tercinta, Vonna Moenica Aprillia, Annisa Syaliva Munira, dan Tri Lisana Sidqi yang telah memberikan dukungan dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis selama proses perskripsian ini.
9. Terima kasih untuk sahabat terbaikku, Rahmatunnisa Djulihardy dan Runti Susanti yang telah membantu dan

terus menyemangati serta memberi dukungan kepada penulis selama proses perskripsian ini.

10. Teruntuk teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2017 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan dikampus.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Penulis,

Rezky Wulan Ramadhani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف
hauula: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَةُ

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rezky Wulan Ramadhani
NIM : 170602117
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Khairul Amri.,S.E.,M.Si
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E.,M.Si.,AK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengangguran di Kota Banda Aceh, kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan sudahkah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dalam menanggulangi pengangguran. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh khususnya Kecamatan Baiturrahman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan namun masih belum efektif. Program-program yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yaitu seperti diadakannya program pelatihan bagi para pengangguran sesuai dengan perspektif ekonomi Islam ataupun tujuan ekonomi Islam dimana salah satu kegiatan pemerintah ini bertujuan bagi kemaslahatan bagi manusia, meskipun hasil dari usaha tersebut belum maksimal untuk mengurangi angka pengangguran.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pengangguran, Perspektif Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR MOTO PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Pengangguran	10
2.1.1 Pengertian Pengangguran	10
2.1.2 Penyebab Pengangguran	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran	12
2.1.4 Dampak Pengangguran	13
2.2 Teori Ekonomi Islam.....	14
2.3 Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam	22
2.4 Indikator Pengangguran Menurut Perspektif Islam.....	29
2.5 Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Upaya Menciptakan Lapangan Kerja.....	32
2.6 Kebijakan Pemerintah Saat Ini Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja.....	34
2.7 Penelitian Terkait.....	37
2.8 Kerangka Berpikir	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian	49
3.1.1 Jenis Penelitian	49
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.2.1 Data Primer	50
3.2.2 Data Sekunder.....	50
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	51
3.3.1 Subjek Penelitian	51
3.3.2 Objek penelitian	51
3.4 Informan Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1 Observasi.....	52
3.5.2 Wawancara.....	53
3.5.3 Dokumentasi dan Kepustakaan	54
3.6 Instrumen Penelitian.....	54
3.7 Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.2 Perkembangan Pengangguran Di Kota Banda Aceh	61
4.3 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh.....	67
4.3.1 Pendapat Masyarakat Mengenai Kebijakan Yang Sudah Dilakukan oleh Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran.....	73
4.3.2 Peran Akademisi Dalam Menciptakan Lulusan Kerja Yang Mampu Bersaing Di Dunia Kerja.....	77
4.4 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	83
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran Terbuka Diprovinsi Aceh Tahun 2017-2020	3
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	42
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	52
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian Wawancara.....	54
Tabel 3.3 Indikator Pengangguran Dalam Perspektif Islam.....	55
Tabel 4.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	60
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan.....	35
Tabel 4.3 Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin ...	64
Tabel 4.4 Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2020, Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1	Peta Kota Banda Aceh.....	58
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun2019 Berdasarkan Kecamatan (Ribu Jiwa).....	32
Gambar 4.3	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam suatu negara pengangguran merupakan kasus yang hingga kala ini belum bisa diatasi oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah. Berbagai metode telah diterapkan untuk menanggulangi kasus ini seperti diadakannya seminar wirausaha, pelatihan – pelatihan kewirausahaan, dan pemberian pinjaman modal usaha agar masyarakat tidak hanya terpacu mencari pekerjaan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sesuai minat dan peluang yang ada. Namun permasalahan ini belum juga dapat dituntaskan. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya (Alghofari,2010).

Indikator keberhasilan usaha untuk menanggulangi masalah besar ini tentu akan mempengaruhi kestabilan sosial dan politik dalam pembangunan ekonomi jangka panjang kehidupan masyarakat. Terlebih keadaan dimasa pandemi *Covid-19* yang tak kunjung hilang sampai dengan saat ini, menjadikan terbatasnya peluang kerja serta memicu peningkatan tingginya tingkat pengangguran. Peningkatan angkatan kerja baru yang banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menerus menunjukkan kesenjangan yang besar. Kondisi tersebut semakin

membesar setelah krisis ekonomi, kesenjangan antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan termasuk pada Provinsi Aceh.

Permasalahan pengangguran ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar di Provinsi Aceh, didalam pengangguran yang tinggi akan berdampak terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah terkait dengan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan demikian jumlah angkatan kerja yang cukup besar, dan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, yang membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Permasalahan- permasalahan tersebut semakin rumit seiring adanya konflik antara pengusaha dan pekerja terkait dengan upah yang mereka peroleh, dan tingkat inflasi yang cenderung naik. Pengangguran dapat menurunkan tingkat kesejahteraan yang diindikasikan dengan menurunnya daya beli seseorang karena orang tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup sehingga tidak dapat melakukan aktifitas, konsumsi.

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA			
	2017	2018	2019	2020
Simeulue	3.12	4.95	5.82	5.47
Aceh singkil	7.14	7.96	8.58	8.24
Aceh selatan	7.24	6.03	6.54	6.54
Aceh tenggara	4.75	3.75	3.45	5.72
Aceh timur	8.42	6.92	7.61	7.26
Aceh tengah	3.91	2.11	2.65	3.05
Aceh barat	6.20	8.58	7.41	7.30
Aceh besar	8.49	7.29	7.67	7.62
Pidie	7.64	7.24	6.83	6.45
Bireun	4.50	3.52	3.83	4.12
Aceh utara	11.02	10.14	8.65	8.56
Aceh barat daya	3.16	3.93	4.29	3.93
Gayo lues	1.71	2.49	1.74	2.01
Aceh tamiang	5.43	6.21	6.04	7.97
Nagan raya	4.11	5.91	5.35	5.11
Aceh jaya	6.23	4.91	4.18	4.08
Bener meriah	1.06	1.06	1.03	1.35
Pidie jaya	4.89	5.02	4.34	6.58
Banda aceh	7.75	7.24	6.89	9.54
Sabang	3.00	4.19	4.60	4.81
Langsa	7.03	7.12	7.69	9.75
Lhokseumawe	10.51	12.51	11.01	11.99
Subulussalam	4.91	6.44	7.25	6.93
Aceh	6.57	6.34	6.17	6.59

Sumber: BPS PROVINSI ACEH, (2022)

Jumlah pengangguran di Aceh meningkat 19 ribu orang untuk presentase dari 6,2% menjadi 6,59%. Daerah pengangguran tertinggi masih ditempati oleh kota Lhokseumawe. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat Pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan (persen) dari tahun 2017 hingga agustus 2020, yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu pada tahun 2017 sebanyak 10,51% dan ditahun 2020 menjadi sebanyak 11,99. Sedangkan Banda Aceh menduduki posisi kedua tertinggi setelah Lhokseumawe. Penyebab dari terjadinya peningkatan pengangguran di Aceh disebabkan oleh pandemi *Covid 19* yang gejala mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian nasional dan global.

Banda Aceh adalah pusat kota dan pusat terjadinya transaksi ekonomi di Provinsi Aceh. Oleh karena itu kota tersebut menjadi kota yang paling menjadi sorotan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Seperti dilihat dari tabel diatas tingkat penganggurannya juga cukup tinggi ditahun 2017 yaitu sebesar 7,75% dan mengalami penurunan serta kenaikan dari tahun ketahun, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan diangka 9,54%. Hal tersebut tentu menjadikan perhatian pemerintah karena dapat berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Tolak ukur keberhasilan pemerintahan juga dapat dilihat dari banyaknya pengangguran dan angka kemiskinan yang ada pada masyarakat untuk itu peran

pemerintah dalam mengatasi pengangguran sangat-sangat diperlukan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, menganggap solusi utama dari permasalahan pengangguran adalah bekerja. Karena, kerja merupakan suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja, akan bergantung kepada orang lain, atau dengan kata lain selalu menempatkan tangan nya „dibawah“ tangan – tangan orang lain. Dengan tidak bekerja juga dianggap telah menyia-nyiakan tangannya yang menjadi salah satu rezeki dari Allah SWT yang dapat digunakan atau berfungsi untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk diri sendiri maupun kebutuhan keluarga serta anak – anaknya. Dalam Islam juga melarang umat nya untuk mengemis, karena mengemis juga berarti tidak percaya kepada Allah SWT atas kemampuan diri sendiri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Pandangan Al-Qur’an mengenai larangan mengemis ini sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang – orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang –

orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta – minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri – cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Islam telah memproklamirkan dengan tegas baik Al-Qur’an maupun Hadits yang mengajurkan manusia untuk bekerja keras dan cerdas. Bahkan Islam menilai bekerja merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, sehingga bekerja dinilai sebagai bentuk ibadah, karena dengan bekerja berarti seseorang telah mempotensikan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Sebaliknya, menganggur berarti menyalah – nyiakan amanah Allah.

Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah jelas dalam surah al-Ma’un. Dalam sisi supply Allah mengajarkan muslim untuk menjadi optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT. Manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan daruriyah / primer, hajiyah / sekunder dan tashiyah / tersier. Semua ini merupakan upaya agar manusia dapat mempertahankan hidupnya sehingga manusia dapat menjalankan aktifitas keseharian dibidang agama.

Setiap tahunnya peningkatan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh semakin meningkat, namun faktor yang menyebabkan

tingginya tingkat pengangguran bukanlah jumlah penduduk tetapi minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan keahlian dan kemampuan angkatan kerja. Dalam mengatasi masalah ini Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah melakukan upaya- upaya untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan para pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Banda Aceh. Kelas ketrampilan yang diselenggarakan setiap tahunnya yaitu administrasi perkantoran, web programming, surveyor, tataboga, menjahit dan lain – lain, dengan tujuan usia angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan dengan ketrampilan yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Banda Aceh dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan pengangguran di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Banda Aceh?

3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi pengangguran jika ditinjau dari perspektif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui perkembangan pengangguran di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui apakah upaya pemerintah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dalam menanggulangi pengangguran di Kota Banda Aceh

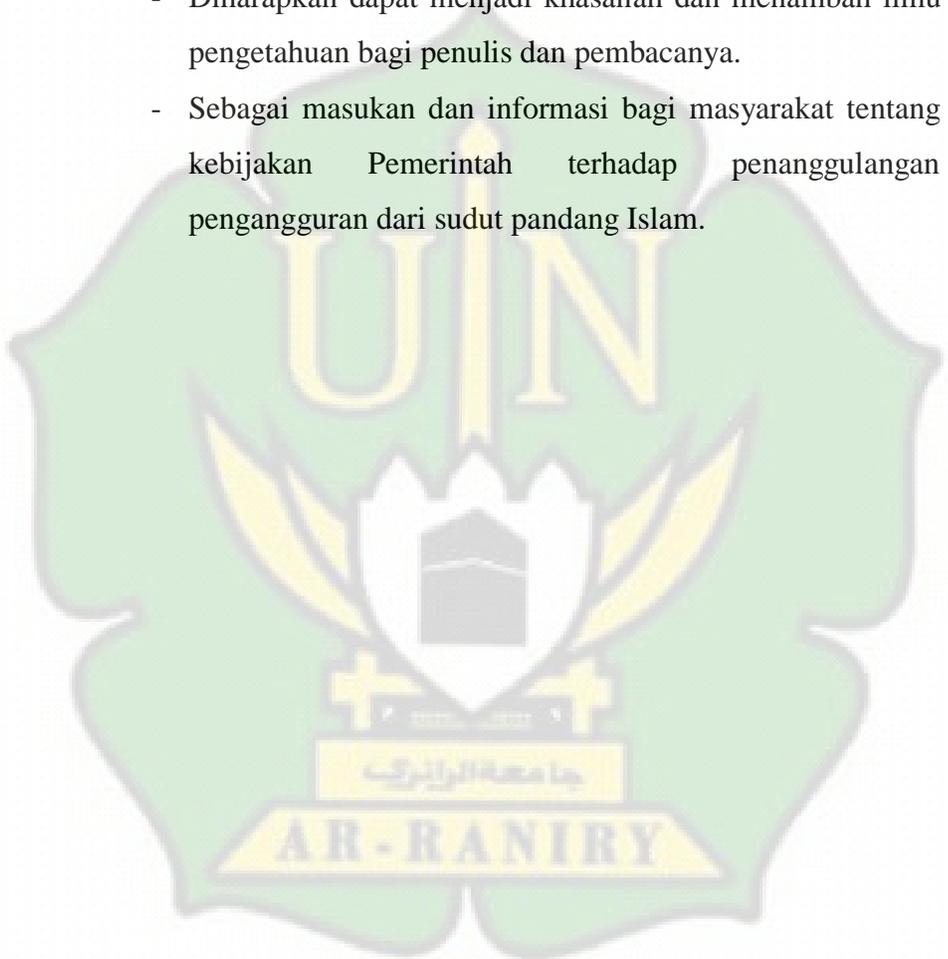
1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - Diharapkan agar dapat menjadi kajian tingkat lanjut pada penelitian berbasis ekonomi syariah.
 - Dapat disajikan sebagai literatur dan bahan bacaan mengenai pengangguran dalam perspektif Islam.
 - Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan pengangguran di Kota Banda Aceh, sehingga dapat menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

- Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa ekonomi dan pihak – pihak lainnya yang melakukan kajian sejenis.
- Diharapkan dapat menjadi khasanah dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembacanya.
- Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat tentang kebijakan Pemerintah terhadap penanggulangan pengangguran dari sudut pandang Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengangguran

2.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengertian Pengangguran merupakan keadaan yang keberadaannya tidak terelakan, baik itu dinegara berkembang maupun di negara maju sekalipun sangat berpengaruh pada terjadinya masalah kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012). Menghitung tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Menurunnya kemakmuran dan kesejahteraan dapat diakibatkan karena pengangguran karena mereka tidak mempunyai pendapatan sehingga harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Badan Pusat Statistik menyatakan indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah umur 15 tahun keatas yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum memulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah strategi perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung ke standar kehidupan dan tekanan psikologis terhadap masyarakat (Hasyim, 2017). Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang berdasarkan 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selain itu pengangguran diartikan menjadi suatu keadaan dimana seorang yang tergolong pada angkatan kerja yang ingin menerima pekerjaan namun belum memperolehnya.

2.1.2 Penyebab Pengangguran

Penyebab terjadinya pengangguran (Gunawan, 2017) :

1. Penduduk yang relative banyak
2. Pendidikan dan ketrampilan yang rendah
3. Angkatan kerja tidak memenuhi persyaratan diminta dunia kerja
4. Teknologi yang semakin *modern*
5. Pengusaha yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan

Pada dasarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pengangguran tidak hanya untuk si pengangguran itu sendiri, namun bisa juga berimbas ke masyarakat sekitarnya. Seperti contoh maraknya aksi kejahatan dilingkungan sekitar seperti mencuri, merampok, dan mencopet disebabkan oleh seseorang yang harus tetap bertahan hidup memenuhi kebutuhan tetapi tidak mempunyai pekerjaan untuk mengcover semua biaya hidup. Maka timbulah keinginan untuk mendapatkan uang dengan segala macam cara.

2.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Hasyim (2015:198) menyatakan ada 2 cara dalam menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu dari sumber/penyebab yang mewujudkan pengangguran dan karakteristik pengangguran tersebut. Berikut jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran normal atau friksional merupakan jenis pengangguran yang ditimbulkan dari penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal merupakan jenis pengangguran yang ditimbulkan dari merosotnya aktivitas ekonomi atau lantaran terlampau kecilnya permintaan agregat pada perekonomian dibanding penawaran agregatnya.
3. Pengangguran struktural merupakan jenis pengangguran yang ditimbulkan dari adanya perubahan struktur aktivitas ekonomi.
4. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian energi manusia (tenaga manusia) oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Menurut Hasyim (2015:198), penggolongan jenis pengangguran dari cirinya adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran ini tercipta dari akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah menurut penambahan energi kerja.

2. Pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran ini tercipta dari dampak jumlah pekerja pada suatu aktivitas ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan.
3. Pengangguran bermusim yaitu pengangguran yang tercipta dari dampak musim yang ada, umumnya pengangguran ini masih ada pada sektor pertanian dan perikanan.
4. Setengah menganggur yaitu pengangguran yang tercipta dari dampak tenaga kerja bekerja tidak sepenuhnya dan jam kerja mereka juga jauh lebih rendah menurut pekerja lainnya.

2.1.4 Dampak Pengangguran

Beberapa akibat negatif dari pengangguran dibagi menjadi dua aspek (Sukirno,2000) dimana kedua aspek tersebut adalah :

1. Akibat negatif bagi kegiatan ekonomi tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Akibat negatif yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a) Pengangguran menyebabkan mereka tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai.
 - b) Pengangguran menurunkan penerimaan pajak pemerintah. Pengangguran disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi dan dengan rendahnya kegiatan ekonomi, penerimaan pajak negara juga akan menurun.
 - c) Pengangguran tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengangguran memiliki dua dampak negatif terhadap

kegiatan sektor swasta di satu sisi, pengangguran tenaga buruh juga diikuti oleh kelebihan kapasitas mesin perusahaan, dan di sisi lain, pengangguran yang disebabkan oleh keuntungan yang rendah, lambatnya kegiatan usaha menyebabkan penurunan keinginan. untuk berinvestasi.

2. Akibat negatif bagi individu dan masyarakat pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan stabilitas sosial dalam masyarakat beberapa kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pengangguran adalah:

- a) Pengangguran menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan.
- b) Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya keterampilan. Keterampilan dalam melakukan pekerjaan hanya dapat dipertahankan jika keterampilan ini digunakan dalam praktik.
- c) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik kegiatan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

2.2 Teori Ekonomi Islam

Dalam teori ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara

memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.

1. Peran Negara Dalam Menciptakan Pasar yang Efisien

Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan
2. Menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil
3. Mengawasi kegiatan perusahaan terutama perusahaan yang menguasai pasar agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan
4. Menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan

Sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, antara lain :

1. Peranan alokasi

Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalam penyediaan jalan, rumah sakit, sekolah dan keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab kegagalan pasar adalah barang publik, dimana manusia tidak dapat terlepas akan kebutuhan barang publik. Sedangkan tidak ada kontribusi yang senilai dari konsumen dalam penggunaan barang publik, sehingga pemerintah harus menyediakan anggaran guna penyediaan barang publik tersebut. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara adalah terbatas. Sehingga pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki akan digunakan untuk menyediakan barang publik dan seberapa besar lainnya yang digunakan untuk menyediakan barang individu.

2. Peranan distribusi

Pemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dapat tersalurkan secara merata, antara lain melalui :

- a) Perpajakan
- b) Subsidi
- c) Pengentasan kemiskinan
- d) Bantuan pendidikan
- e) Bantuan kesehatan

f) Bantuan pembangunan daerah

Melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam mendistribusikan kekayaan atau pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang berasal dari penarikan pajak, dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil dan terluar seperti pembangunan tol di Papua.

3. Peranan stabilisasi

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang dapat menimbulkan pengangguran dan inflasi. Karena itu, pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara menjaga agar permasalahan ekonomi tidak merembet ke sektor lain dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada persaingan tidak sempurna, dimana pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan, yang menyebabkan penentuan harga barang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan monopoli. Sehingga, pemerintah melakukan beberapa upaya berupa pengendalian harga dan pengenaan pajak. Dengan pengendalian harga maksimum pada persaingan sempurna, monopoli akan beroperasi pada tingkat harga dan output yang sama sehingga terjadi efisiensi alokasi sumber daya, karena harga yang terbentuk mencerminkan biaya marginalnya.

Di sisi lain, penetapan pajak akan mempengaruhi output yang dihasilkan monopoli dan harganya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan keuntungan berkurang. Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga merupakan kebijakan yang lebih efektif dibanding kebijakan pajak untuk mengatasi kegagalan pasar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, perekonomian menjadi tidak terkendali yang dapat menimbulkan inflasi, pengangguran dan ketimpangan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dapat menimbulkan pertentangan, misalnya pada pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya. Hal ini karena proporsi pengeluaran masyarakat miskin lebih tinggi daripada golongan kaya, sehingga kebijakan ini lebih efektif untuk menekan laju inflasi karena pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi permintaan golongan miskin terhadap barang dan jasa. Namun, pengenaan pajak yang tinggi untuk golongan miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin pincang, sehingga peran pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan menjadi gagal.

2. Peran Negara Dalam Mengatasi Eksternalitas

Eksternalitas merupakan dampak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan. Sedangkan menurut Reksohadiprojo (2001), yang dimaksud eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tercermin dalam harga.

Pada aktivitas dan tindakan ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya dan distribusikonsumsi pada ekonomi pasar dengan persaingan bebas dan sempurna bisa terganggu, apabila individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai eksternalitas baik terhadap mereka sendiri ataupun terhadap pihak lain.

3. Peran Negara Berkaitan Dengan Implementasi Moralitas Islam

Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu, dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah (tangan besi), apabila kondisi membutuhkannya sebagaimana yang dijabarkan di atas berdasarkan ayat Al-Qur'an Al-Hadid ayat 25.

Dalam pembahasannya, mengenai peran negara dalam ekonomi, Muhammad Al Mubarak, dalam buku Nizam al-Islam, menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari tiga soko guru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan ('adalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah/ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-quran dsb), termasuk muamallah (termasuk ekonomi). Musyawarah hingga akhlak.

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu azaz, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya agama Islam didunia ini. Pada fase ketika Rasulullah SAW di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah SAW baru terlaksanakan ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Dengan adanya lebel Islam dalam ekonomi, ini berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut 'ekonomi Islam' atau kalau dihubungkan dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas al-Qur'an dan hadits. Ini berarti bahwa

kata Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak menggunakan dasar al-Qur'an dan hadits. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya ekonomi Islam tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan Islam akan kehilangan makna sebagai pedoman yang paling sempurna untuk manusia.

Oleh karena itu nama ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh mainset dan penafsiran kaum muslimin terhadap praktik ekonomi Islam yang kita temukan. Apabila pengalaman ekonomi Islam berkaitan dengan aturan-aturan tentang perintah dan larangan semata, maka nama ekonomi Islam lebih banyak berkaitan dengan norma. Justru, interpretasi ini akan membangun paradigma bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu normatif. Bila pengalaman yang kita temukan banyak berkaitan tentang persoalan aktual, misalnya praktik lembaga keuangan syariah dan praktik zakat maka menghasilkan ekonomi Islam yang lebih berbeda.

Perspektif Ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al- Qur'an Al – Karim dan As – Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab”. Ekonomi Islam membawa kepada konsep Al – Falah (kejayaan) didunia dan akhirat, ekonomi

Islam meletakkan manusia sebagai Khalifah di bumi dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia, mencari ridha Allah merupakan faktor utama dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena pengaruh keyakinan yang kuat akan kehadiran Allah, dan ide – ide yang kuat antara lain yakni kesejajaran manusia dihadapan Allah tentang orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya, tentang kewajiban orang kaya untuk membelanjakan kekayaannya secara sederhana, karena mereka bukan pemilik melainkan penerima amanat atas kekayaan itu, pada dasarnya manusia merupakan pelaku yang bebas dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

2.3 Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Gunawan (2017) menyatakan “Negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Karena pengusaha akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rakyat yang dipimpinnya”. Lebih detail Rasulullah SAW secara praktis senantiasa berupaya memberikan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Bekerja adalah salah satu usaha yang dilakukan seseorang baik sendiri maupun kolektif untuk memproduksi atau memberi jasa. Hal tersebut seperti disinyalir oleh Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Dalam ajaran Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang mukmin asal dengan niat yang benar adalah mulia, kecuali yang dilarang (haram).

Menurut Gunawan (2017) ada beberapa cara – cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi.

1. Mekanisme individu

Dalam mekanisme ini pengusaha secara langsung memberikan pemahaman kepada individu terutama melalui, sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan berkedudukan. Orang – orang yang bekerja dihadapan Allah serta memberikan *skill* dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam juga mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak nas Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan Saad bin Muadz tatkala beliau melihat bekas kerja pada tangannya, seraya bersabda (yang artinya). “Ini adalah dua tangan yang dicintai Allah”

Apabila ada individu yang mengabaikan kewajiban mencari nafkah padahal ia mampu bekerja, maka negara berkewajiban memaksanya untuk memenuhi kewajiban memaksanya untuk menunaikan kewajibannya salah satunya yaitu bekerja. Terkecuali individu tidak bekerja dikarenakan cacat, tidak memiliki keahlian serta tidak ada modal untuk bekerja maka pengusaha berkewajiban menyediakan sarana dan prasarannya, kecuali dalam pendidikannya. Islam mengajarkan bahwasanya menciptakan

lapangan kerja adalah kewajiban negara dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan urusan rakyat.

2. Mekanisme Sosial Ekonomi

Suatu mekanisme yang dilakukan oleh para pengusaha melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan dibidang ekonomi maupun bidang sosial yang berkaitan dengan masalah pengangguran. Kebijakan pengusaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal yang nantinya dikembangkan disektor real. Baik dibidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Dalam sektor pertanian, disamping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Pada sektor industri Khalifah akan mengembangkan industri alat – alat (industri penghasil mesin) sehingga nantinya akan mendorong tumbuhnya industri – industri lain. Selama ini negara – negara barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat – alat di negeri – negeri kaum Muslim agar negeri – negeri Muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka.

Selanjutnya untuk sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai Wakil Umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Dan pada sektor sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan

wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (ummu wa rabbah al-bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki – laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

Kemudian kebijakan kedua yang dapat dilakukan adalah, Negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan), dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap, terhadap pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang akan dipenuhi oleh negara secara langsung kepada setiap individu atau rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara.

Untuk menjamin terlaksanakannya strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan strategi tersebut. Adapun strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan hasil

yang diperoleh dari pelaksanaan strategi tersebut. Adapun tahap-tahap strategi tersebut adalah :

- a) Memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja. Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman : *“Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya” (Q.S Al-Mulk :15)*. Firmannya juga : *“...Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu’ah : 10)*.

Dari nash-nash diatas juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yaitu dengan cara ‘Bekerja’.

- b) Negara menyediakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Jika orang-orang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau

memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal itu memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda : *“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya”* (HR.Bukhari dan Muslim).

Maka dari itu wajib atas Waliyyul Amri (pemerintah) memberikan sarana – sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dari pengaturan urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan oleh *syar’i*, dan telah diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (Daulah Islamiyah), terutama dimasa – masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

- c) Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang – orang tertentu, jika kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas pekerjaan, namun seorang individu tidak mampu bekerja sehingga tidak mampu mencukupi nafkah anggota keluarga nya yang menjadi tanggung jawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada

para kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah SWT : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian ...”* (Q.S Al Baqarah : 233).

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maksud dari ‘*al waarits*’ pada ayat tersebut, bukanlah hanya orang yang telah mendapatkan warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapatkan warisan dalam semua keadaan.

Kebijakan ketiga yang dapat dilakukan adalah, negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil. Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa

kepada pengusaha. Islam sudah mengatur secara jelas dan rinci terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijarah al-ajir (kontrak kerja). Peraturan tersebut mencakup beberapa hal, yaitu (1) Ketentuan mengenai kontra kerja antar pengusaha dengan pekerja. (2) Ketentuan mengenai peraturan dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja. (3) Ketentuan mengenai peraturan cara dalam mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak (baik itu pengusaha maupun pekerja) terhadap pihak lain. Paling utama yaitu permasalahan pengupahan, pengusaha tidak diperkenankan memperlakukan pegawainya/pekerjanya dengan sewenang – wenang. Seperti, mengurangi hak pekerja, atau tidak membayar gaji pekerja. Kesewenang – wenangan, bagaimanapun akan dibalas, entah ketika didunia maupun di akhirat. Rasulullah S.A.W. mengatakan “orang yang mampu menunda pembayaran adalah dzalim, dan boleh dihakimi dan di hukum.” (HR. Abu Daud). Itulah beberapa mekanisme Islam yang InshaAllah dapat mengatasi masalah pengangguran dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

2.4 Indikator Pengangguran Menurut Perspektif Islam

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari seseorang harus mempunyai penghasilan dengan cara bekerja. Banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan sesuai ketrampilan untuk dapat

memenuhi kebutuhan hidup setiap hatinya. Bekerja menjadi pilihan setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang layak dimasa depan. Setiap individu mempunyai hak untuk bekerja ataupun tidak. Gaji diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun Allah sudah menanggung rizki kita untuk dipenuhi, namun tidak serta merta tanpa usaha dan hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa.

Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem”. Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan). Menurut Qardhawi (2005:6-18) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pengangguran jabariyah (terpaksa)

Suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa

dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

2. Pengangguran khiyariyah (Karena Pilihan)

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas- malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi “sampah masyarakat”. Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang menurut Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain. memandang bahwa akar masalah kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu :

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya.
2. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil memakan harta anak yatim dan memakan harta riba.
4. Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa.
5. Kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.

2.5 Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Upaya Menciptakan Lapangan Kerja

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, peran pemerintah menjadi kunci utama yang sangat penting seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya pengembangan

ketenagakerjaan yaitu perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro yang meliputi :

1. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.

2. Penempatan Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja berhak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. Penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara sesuai tanpa diskriminasi.

3. Perluasan Kesempatan Kerja

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Semua kebijakan baik pusat maupun daerah disetiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kerja. Perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat

yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

2.6 Kebijakan Pemerintah Saat Ini Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja

Upaya Pemerintah dalam memerangi pengangguran salah satunya dengan menciptakan kebijakan – kebijakan yang diberlakukan pada negara tersebut. Teori kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tujuan dapat menekan jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja seluas – luasnya. Kebijakan yang umumnya berlaku dari tahun ke tahun di Indonesia adalah Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter yaitu kebijakan yang dibuat untuk mengarahkan suatu kondisi ekonomi dan mengatur ketersediaan uang disuatu negara.

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan anggaran atau dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya mampu menurunkan tingkat pengangguran. Dalam Qanun Aceh nomor 1 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022, pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan APBA terdiri atas Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, dan pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan rincian dari pendapatan aceh, belanja aceh, dan juga pembiayaan aceh. Pada Qanun Aceh nomor 1 tahun 2022 ini juga memaparkan rincian belanja yang digunakan untuk salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Dampak dari pembangunan infrastruktur salah satunya adalah mampu menurunkan tingkat

pengangguran. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan perkapita. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pemerintah akan memprioritaskan pengalokasian anggaran infrastruktur dalam APBN dan APBD dengan harapan cara tersebut mampu menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi, serta infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor real bisa ditingkatkan lebih baik lagi sehingga angka kemiskinan serta ketimpangan sosial dapat dikurangi. Pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dikatakan mampu menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Hal ini dikarenakan pembangunan dibidang pendidikan menjadi salah satu roda penggerak dalam proses pembangunan manusia yang lebih baik lagi dengan kata lain proses pembangunan manusia yang lebih berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang kompeten, dan berdaya saing. Contoh yang bisa diambil mengenai pembangunan di dalam bidang pendidikan adalah hadirnya banyak sekolah kejuruan yang memberikan pemahaman mengenai dunia kerja yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, dan juga mengenai bagaimana pembangunan pendidikan ini sebagai penggerak indeks pembangunan manusia yang ada. Diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi serta tidak

ada nya daya saing yang dimiliki dan juga bertambahnya jumlah angkatan kerja disetiap tahun nya yang kemudian terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Dengan demikian salah satu solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah pemerintah memberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada bidang pendidikan yang nantinya mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh melalui pembiayaan *microfinance*, sehingga dapat tercapainya cita-cita Kota Banda Aceh yang menjadi kota gemilang, terbuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LKMS merupakan salah

satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mananggulangi pengangguran dikota Banda Aceh.

Untuk wilayah Aceh pembangunan ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Qanun Aceh No 7 Tahun 2014, dimana upaya- upaya pemerintah Aceh dalam mengatasi pengangguran dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja dan pemagangan yang diselenggarakan dalam program BLK (Balai Latihan Kerja) dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan ataupun *skill* para angkatan kerja. Selain itu perluasan kesempatan kerja juga dilakukan oleh pemerintah Aceh, dengan cara mewajibkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, yang ada di Aceh agar memberikan bantuan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk perluasan kesempatan kerja.

2.7 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi referensi penelitian ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu :

Afri et al. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon”, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan dengan membuat

kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan daya serap angkatan seperti BLK yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dapat bersaing dengan SDM yang diluar daerah. Daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Juliman et al. (2021) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dalam mengurangi pengangguran perkotaan belum terlaksana, karena kenaikan tingkat pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Database yang tidak akurat, tidak dikembalikan karena AK 1 setelah diterbitkan. Setidaknya peluang kerja dan penempatan jabatan kerja tidak sesuai dengan bidangnya.

Lestari & Repa (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung upah minimum dan pengangguran terhadap pertumbuhan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh secara langsung upah minimum dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara langsung melalui kemiskinan. Upah minimum dan pengangguran melalui

kemiskinan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 77,6% dan sisanya 22,4% diperoleh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Ade Fadlun Heluh (2020) melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon Provinsi Maluku, Cibadak Lebak Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon masih belum efektif hal ini dapat dilihat bahwa sudah terdapat tiga dimensi yang dianggap sudah baik, yang mana tiga dimensi tersebut yakni peran sebagai komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, peran sebagai peran terapi namun masih terdapat dua peran dimensi yang masih kurang efektif.

Gunawan (2017) dengan judul penelitian “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2006 yaitu 17,05% dengan peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 tingkat pengangguran hanya berkisar 7,70%. Pemerintah daerah melakukan kebijakan - kebijakannya seperti mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.

Safriani & Dayyan (2017) dengan judul penelitian “Strategi Ekonomi Islam Dalam Menekan Angka Pengangguran”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencarian.

Bayu et al. (2017) dengan judul penelitian “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran di Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana ditahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Kerja, karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.

Indayani & Hartono (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat diukur melalui peningkatan dan penurunan produk domestik bruto (PDB/GDP)

yang menghasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. Pada masa pandemi Covid-19 ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% (*year on year*). Sedangkan pengangguran mengalami peningkatan akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan.

Dewita (2013) telah melakukan penelitian dengan judul “Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran”. Hasil penelitian menunjukkan ada banyak faktor yang disebabkan pengangguran di Indonesia selain investasi yang rendah, pendidikan juga sebagai faktor penyebabnya meningkatnya masalah pengangguran. Kegagalan adalah pada sistem pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan untuk karyawan sendiri. Beberapa strategi yang dibutuhkan di Indonesia untuk enhance lingkungan investasi dan sistem pendidikan di Indonesia.

Lelau (2013) melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Manado terhadap tingkat pengangguran telah berjalan dengan baik, walaupun kebijakan tersebut masih tergolong sedikit. Kebijakan pemerintah terhadap penurunan tingkat pengangguran,

yang telah diupayakan ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kerja sama antara Pemerintah, investor serta masyarakat umum. Lembaga pelatihan ketrampilan merupakan salah satu kebijakan yang sudah cukup berhasil dikota Manado.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon, oleh Afri et al. (2021)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan dengan membuat kebijakan- kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan daya serap angkatan seperti BLK yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dapat bersaing dengan SDM yang diluar daerah. Daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2	Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, oleh Juliman et al. (2021)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dalam mengurangi pengangguran perkotaan belum terlaksana, karena kenaikan tingkat pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Database yang tidak akurat, tidak dikembalikan karena AK 1 setelah diterbitkan. Setidaknya peluang kerja dan penempatan jabatan kerja tidak sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi, oleh Lestari & Repa (2021)	Kualitatif Statistik Path Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung upah minimum dan pengangguran terhadap pertumbuhan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh secara langsung upah minimum dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara langsung melalui kemiskinan. Upah minimum dan pengangguran melalui kemiskinan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 77,6% dan sisanya 22,4% diperoleh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
4	Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon Provinsi Maluku, oleh Ade Fadlun Heluh (2020)	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon masih belum efektif hal ini dapat dilihat bahwa sudah terdapat tiga dimensi yang dianggap sudah baik, yang mana tiga dimensi tersebut yakni peran sebagai komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, peran sebagai peran terapi namun masih terdapat dua peran dimensi yang masih kurang efektif.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran, oleh Gunawan (2017)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2006 yaitu 17,05% dengan peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 tingkat pengangguran hanya berkisar 7,70%. Pemerintah daerah melakukan kebijakan – kebijakannya seperti mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
6	Strategi Ekonomi Islam Dalam Menekan Angka Pengangguran, oleh Safriani & Dayyan (2017)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencarian.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran di Kabupaten Minahasa, oleh Bayu et al. (2017)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana ditahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja, karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.
8	Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19, oleh Indayani & Hartono (2020)	Analisis Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat diukur melalui peningkatan dan penurunan produk domestik bruto (PDB/GDP) yang menghasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. Pada masa pandemi COVID-19 ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% (<i>year on year</i>). Sedangkan pengangguran mengalami peningkatan akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran, oleh Dewita (2013)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan ada banyak faktor yang disebabkan pengangguran di Indonesia selain investasi yang rendah, pendidikan juga sebagai faktor penyebabnya meningkatnya masalah pengangguran. Kegagalan adalah pada sistem pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan untuk karyawan sendiri. Beberapa strategi yang dibutuhkan di Indonesia untuk enhance lingkungan investasi dan sistem pendidikan di Indonesia.
10	Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado, oleh Lelau (2013)	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian meunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Manado terhadap tingkat pengangguran telah berjalan dengan baik, walaupun kebijakn tersebut masih tergolong sedikit. Kebijakan Pemerintah terhadap penurunan tingkat pengangguran, yang telah diupayakan ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kerja sama antara pemerintah, investor serta masyarakat umum. Lembaga pelatihan ketrampilan merupakan salah satu kebijakan yang sudah cukup berhasil dikota Manado.

Sumber: diolah (2022)

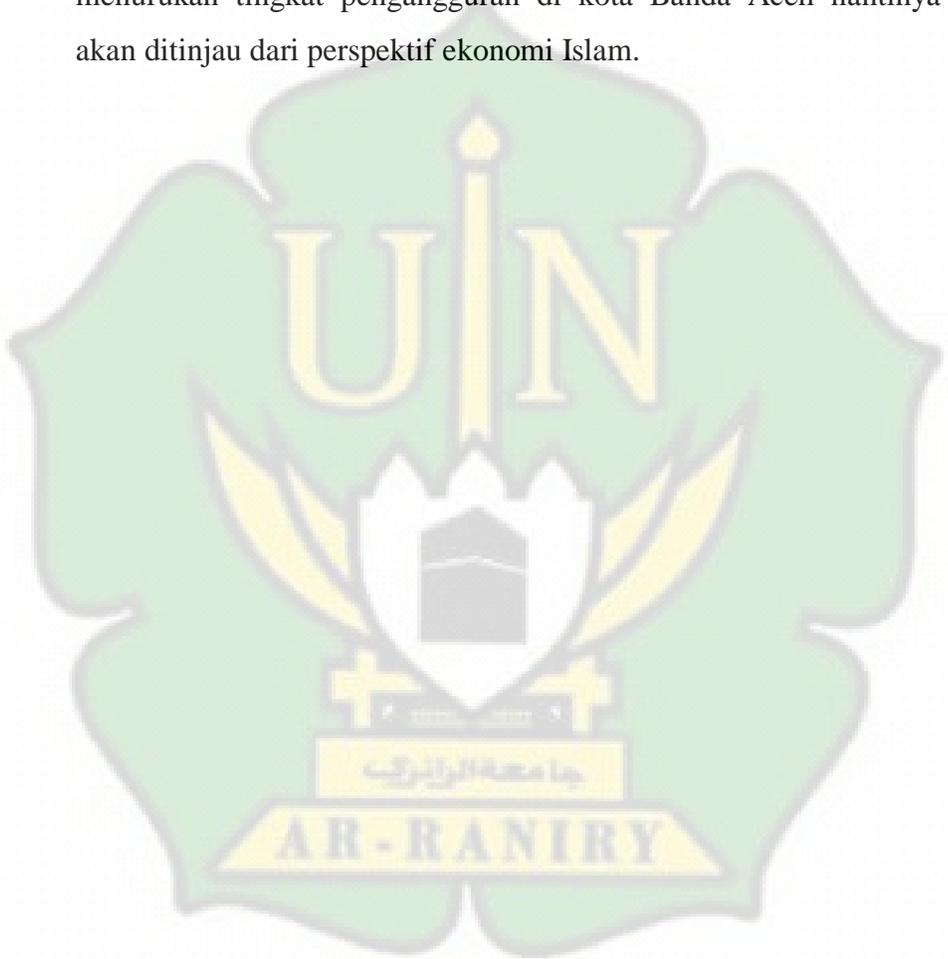
2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana pengaruh dari kebijakan pemerintah Aceh dalam menanggulangi permasalahan pengangguran di kota Banda Aceh, dan melihat apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menurunkan tingkat pengangguran dikota Banda Aceh, dan kemudian dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran yang ada di kota Banda Aceh setelah menerapkan kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh atau upaya Pemerintah kota Banda Aceh dalam menuruka tingkat pengagguran di kota Banda Aceh. Terutama tingkat pengangguran terbuka di kota Banda Aceh, tingkat pengangguran tersembunyi di kota Banda Aceh kebijakan,

dan tingkat pengangguran bermusim di kota Banda Aceh. Kemudian, dari hasil perkembangan tingkat pengangguran setelah diterapkan kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh dalam menurunkan tingkat pengangguran di kota Banda Aceh nantinya akan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2013), penelitian kualitatif yaitu kajian dilakukan dengan mengkaji langsung ke lapangan. Penelitian menggunakan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat tanpa pengolahan data numerik. Menurut Umar, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menyampaikan pemikiran dan penemuan peneliti tentang data dari penelitian, bukan mengolah hasil penelitian dalam bentuk perhitungan numerik. (Husein Umar, 2005).

Pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan Ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Peneliti juga mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara memberikan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan logika mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Etta Mamang Sangadji Sopiah, 2010:171).

Penelitian ini dilakukan di beberapa titik atau tempat yaitu Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan Kantor Kecamatan Baiturrahman.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer, bagian keuangan, dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai keadaan jumlah pengangguran di kota Banda Aceh untuk periode 2015 sampai dengan 2020.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya akan dijadikan sasaran penelitian.

3.3.2 Objek penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Aceh dalam menanggulangi pengangguran di kota Banda Aceh.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan oleh pihak – pihak yang menguasai masalah atau memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Sugiyono (2018:48) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Informan penelitian yaitu orang atau narasumber yang mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2006:132).

Dalam penelitian ini *key* informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung. Untuk *key* informan yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta staffnya, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Baiturrahman dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Rainry serta staffnya serta untuk informan adalah masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa

dan masyarakat bekerja dan pengangguran/*fresh graduate*. Adapun kriteria para informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya adalah :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kebijakan permasalahan
3. Dapat berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan Informan	Jumlah
1	SDM (Masyarakat)	3
2	Akademisi	4
3	Instansi Pemerintah	3
	Total	11

Sumber: data diolah, (2022)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi merupakan kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra

lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini. Sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek peneliti (Burhan, 2007: 115).

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interview*) dengan maksud tertentu wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan (Moeleong, 2007).

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam terhadap informan penelitian, wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3.5.3 Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk melihat dan menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sedangkan kajian kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah ada.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2019, hlm.203) instrument penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Bagaimana pendapat anda mengenai faktor utama yang menjadi sebab terjadinya pengangguran?- Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran?- Bagaimana Langkah yang anda lakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran?- Apakah anda merasakan perubahan dari kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran?
2	Akademisi	<ul style="list-style-type: none">- Apakah pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran?

No	Informan	Pertanyaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran pendidikan terhadap terjadinya pengangguran? - Bagaimana langkah akademisi dalam menciptakan lulusan kerja mampu bersaing didunia kerja? - Bagaimana peran akademisi dalam membantu lulusan baru mendapatkan kesempatan kerja?
3	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di kota Banda Aceh? - Strategi apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di kota Banda Aceh? - Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di kota Banda Aceh? - Apakah hambatan selama pelaksanaan penanggulangan pengangguran dan bagaimana cara mengatasinya?

Sumber: data diolah, (2022)

Tabel 3.3
Indikator Pengangguran Dalam Perspektif Islam

No	Indikato	Alat
1	Pengangguran Jabariyah	Penyebab Terjadinya Pengangguran <ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan - Perkembangan Zaman - Kondisi Lingkungan
2	Pengangguran Khiyariyah	Penyebab Terjadinya Pengangguran <ul style="list-style-type: none"> - Bermalas-malasan - Tidak mau berusaha - Mengharapkan bantuan orang lain

Sumber: data diolah, (2022)

3.7 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah Metode Analisis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu

analisis yang tidak hanya didasarkan pada perhitungan kuantitatif tetapi dalam bentuk pernyataan dimana peneliti menentukan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengintrepesikan data yang telah dikumpulkan dan kemudian menganalisanya serta membandingkan dengan teori, lalu diambil kesimpulan yang selanjutnya dapat diberikan saran.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Baiturrahman, dimana kota Banda Aceh adalah ibukota dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekaligus menjadi provinsi wilayah paling barat Pulau Sumatera. Provinsi Aceh memiliki provinsi yang strategis karena menjadi pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Daerah ini juga mendapat julukan serambi Mekkah karena kebudayaan Islam berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya terutama hukum-hukum syariah menjadi hukum yang berlaku di daerah Aceh.

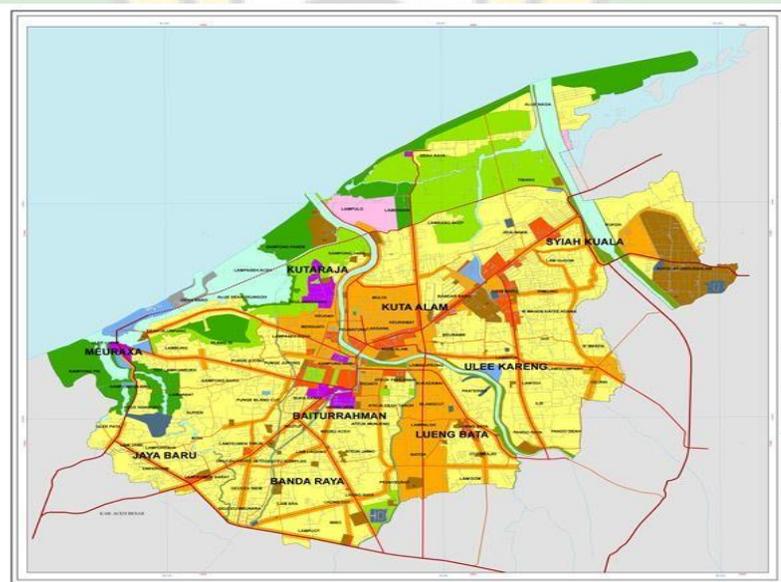
Secara strategis Kota Banda Aceh berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh Khususnya dan Provinsi.

Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh berada di posisi paling barat Pulau Sumatera. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara

dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan berada dibelahan bumi bagian Utara. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas – batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan
4. Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
5. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh



Sumber : Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara 0,45 m sampai dengan $\pm 1,00$ m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2–8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan, khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkungan makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang – kadang tergenang dan tergenang terus menerus seperti pada kawasan rawa – rawa / genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian dibawah permukaan laut pada saat pasang maupun surut air laut. Berdasarkan hasil Digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada tahun 2015, luas Kota Banda Aceh adalah 59,002 km² dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 4.1**Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1	Meuraxa	8,459	14,34%
2	Baiturrahman	4,142	7,02%
3	Kuta Alam	9,587	16,25%
4	Syiah Kuala	13,591	23,03%
5	Ulee Kareng	5,182	8,78%
6	Banda Raya	4,949	8,39%
7	Kuta Raja	3,889	6,59%
8	Lueng Bata	4,445	7,53%
9	Jaya Baru	4,759	8,07%
	Jumlah	59,002	100,00%

Sumber: Hasil Digitasi GIS, Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Tahun 2015

Wilayah Kota Banda Aceh terdiri atas 9 Kecamatan dan 90 *Gampong* (desa). Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh yaitu 265.111 jiwa sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 270.321 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97 persen dan rata-rata kepadatan penduduk 4.410 jiwa/km². Berdasarkan data BPS Kota Banda Aceh 2020, Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 138.993 orang laki-laki dan 131.328 orang perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 51% laki-laki dan 49% perempuan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019
Berdasarkan Kecamatan (Ribu Jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Meuraxa	20.561
2	Jaya Baru	26.525
3	Banda Raya	24.878
4	Baiturrahman	38.192
5	Lueng Bata	26.633
6	Kuta Alam	53.679
7	Kuta Raja	13.900
8	Syiah Kuala	38.682
9	Ule Kareng	27.271
	Total	270.321

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa, untuk wilayah kepadatan penduduk tertinggi ditempati oleh kecamatan Kuta Alam yaitu dengan jumlah 53.679 Jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh kecamatan Kuta Raja. Kuta Alam menjadi tempat bermukim penduduk dengan jumlah yang cukup tinggi karena wilayahnya yang cukup strategis dekat dengan perkotaan dan perkantoran pemerintahan. Jumlah penduduk setiap tahunnya pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengingat Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh sekaligus pusat perniagaan dan terjadinya transaksi ekonomi.

4.2 Perkembangan Pengangguran Di Kota Banda Aceh

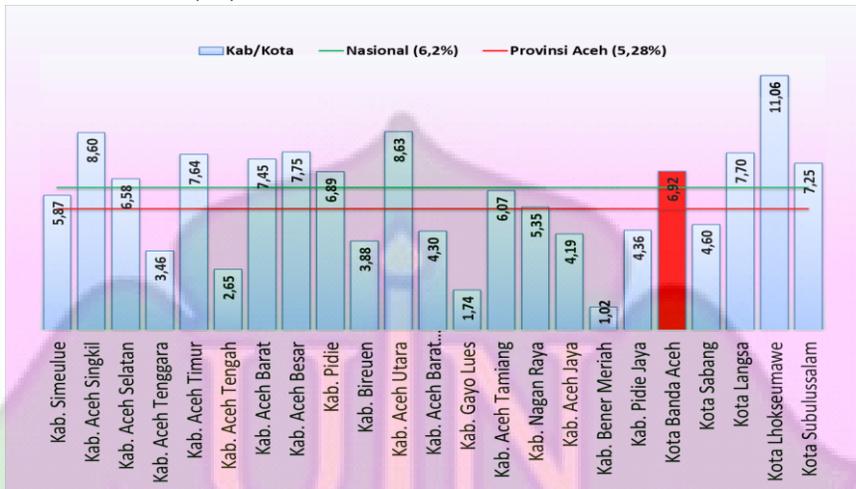
Pertumbuhan angka pengangguran didalam sebuah wilayah akan menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh

pemerintah, karena pengangguran menjadi salahsatu penyebab lambannya laju ekonomi dalam sebuah negara. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan perusahaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu daerah dapat memicu bertumbuhnya angka kemiskinan. Aceh merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia, dilansir dari Badan Pusat Statistik, sudah 19 tahun Aceh menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Jika pengangguran dapat berkurang maka kemungkinan besar untuk menumbuhkan laju ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh akan berjalan dengan lebih baik.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang cukup tinggi (6,92%), dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional (5,28%), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (6,20%). Tingginya tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh yang melebihi tingkat pengangguran nasional, akan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Posisi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : LP2KD Kota Banda Aceh Tahun 2020

4.1.1 Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Terjadinya masalah pengangguran yang salah satu faktor utamanya adalah pendidikan. Banyak masyarakat di Indonesia yang mempunyai latar belakang pendidikan kurang dari 9 tahun. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dikarenakan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya karena latar belakang ekonomi, terpaksa harus mencari pekerjaan. Untuk melihat jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Oleh Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2020 Berdasarkan
Pendidikan dan Jenis Kelamin

<i>No</i>	<i>Pendidikan Education</i>		<i>Laki-Laki Male</i>	<i>Perempuan Female</i>	<i>Jumlah Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD/Sederajat		-	-	-
2	SMP/Sederajat		-	1	1
3	SMA		103	53	156
4	Sarjana Muda		34	59	93
5	Sarjana		98	136	234
		2020	235	249	484
	Jumlah/Total	2019	134	255	389
		2018	94	158	252

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ditahun 2020 angkatan kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ditahun 2019 jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 134 dan perempuan sebanyak 255, bertambah ditahun 2020 laki-laki sebanyak 235 dan perempuan sebanyak 249. Penambahan jumlah pengangguran juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang semakin tinggi.

Tingkat pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan sarjana dimana pencari kerja terbanyak adalah lulusan sarjana. Semakin rendahnya tingkat pendidikan jumlah pencari kerja akan semakin sedikit dan semakin tingginya tingkat pendidikan jumlah pencari kerja atau pengangguran juga akan semakin banyak. Berdasarkan survei Angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2016, pengangguran di Indonesia didominasi oleh

angkatan kerja dengan sekolah menengah keatas dan pendidikan tinggi (Diploma ataupun Sarjana).

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah dari semua tingkat pendidikan di Indonesia dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja (buruh kasar). Hal ini menjadi ironis yang cukup memprihatinkan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang tidak menjadikan mudah dalam mencari pekerjaan, tetapi sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin banyak pesaing dalam mencari pekerjaan dan semakin sempitnya penyerapan tenaga kerja.

4.1.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Selain pendidikan, tingkatan umur dan jenis kelamin juga mempengaruhi seseorang mendapatkan pekerjaan. Jika mereka yang putus sekolah dan masih mempunyai umur dibawah standar perusahaan maka mereka akan kesulitan juga untuk mendapatkan pekerjaan. Dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang menjadikan umur sebagai tolak ukur perekrutan karyawan.

Tabel 4.4
Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Oleh Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2020, Berdasarkan
Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Group Age</i>		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
15-19		50	5	55
20-29		95	38	133
30-44		27	10	37
45-54		-	-	-
55-59		-	-	-
60-64		-	-	-
	2020	172	53	225
Jumlah/Total	2019	218	364	582
	2018	259	290	549

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok umur angkatan kerja 20-29 tahun menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 133 jiwa. Sedangkan umur terendah adalah kelompok umur 30-44 tahun dengan jumlah 37 jiwa. Untuk kelompok umur 15-19 tahun menduduki posisi terbanyak kedua yaitu 55 orang. Usia produktif adalah seseorang yang dapat menghasilkan barang dan jasa, menurut Badan Pusat Statistik usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk termasuk angkatan kerja adalah berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Salah satu penyebab meningkatnya pengangguran adalah umur angkatan kerja itu sendiri, karena banyak kelompok umur usia muda yang sudah menuntaskan pendidikannya dan harus mencari pekerjaan namun ketersediaan lapangan kerja yang ada

tidak sebanding dengan daya serap terhadap angkatan kerja tersebut. Selain itu banyak kelompok usia muda yang sudah lama belum mendapatkan pekerjaan dan menggantungkan hidup kepada keduaorang tuanya, tentu hal ini juga ikut menambah jumlah pengangguran.

4.3 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja menjadi salah satu agenda pemerintah yang menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga dengan harapan mampu mengurangi angka pengangguran. Visi Kota Banda Aceh sesuai RPJMD tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”, melalui 7 Misi Pengembangan, yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari visi RPJMD dapat ditegaskan bahwa penanggulangan pengangguran masuk kedalam misi “ke 3” yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi secara tidak langsung juga didukung oleh misi lainnya yang turut memberi dampak positif bagi upaya mengurangi jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh.

Strategi penanggulangan pengangguran tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tetapi pemerintah pusat juga turut serta serta merta menyusun rencana-rencana yang sekiranya mampu mengurangi angka pengangguran, seperti halnya adanya Kartu Pencari Kerja yang programnya merata keseluruh daerah di Indonesia namun kuota nya juga masih terbatas tidak mampu menyerap semua pencari kerja untuk dapat mengikuti program tersebut.

Untuk mengetahui langkah-langkah kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Banda Aceh peneliti mewawancarai 3 orang narasumber. Berikut hasil wawancara antara dengan para pakar instansi pemerintah yang dijadikan narasumber :

1. Narasumber Pertama yang peneliti wawancarai adalah Bapak Drs.Fahmi, M.Si merupakan Sekretaris Disnaker Kota Banda Aceh wawancara dilakukan tanggal tanggal 6 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa “

Pengangguran adalah ketimpangan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja, dimana jumlah tenaga pekerja lebih banyak dengan lapangan kerja yang tersedia, banda aceh memang dunia provinsi tetapi dunia usaha nya belum maksimal belum maksimal berkembang sehingga dominasi pekerjaan masih ada pada pekerja sipil, dan jasa. Pemerintah menjembatani antara lapangan kerja dimana ada perusahaan dan pencari kerja contohnya dengan kartu pencari kerja. Usaha yang dilakukan yaitu setiap perusahaan yang membutuhkan pekerja menyampaikan ke pemerintah, sehingga informasinya sampai ke pekerja. Selain itu untuk pekerjanya sendiri juga diharapkan agar mendaftarkan diri sebagai pencari kerja kepada disnaker kota masing-masing”.

2. Narasumber kedua. Pada tanggal 06 Juni penulis melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu Bapak Muliadi selaku kepala UPTD BLK menjeaskan bahwa “*pengangguran di Banda Aceh terjadi karena merupakan kota jasa minimnya manufactur ataupun industri yang melakukan produksi secara besar sehingga kebutuhan lapangan kerja juga terbatas. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan dengan cara mengasah ketrampilan sesuai dengan kebutuhan yang berguna diBanda Aceh contohnya dalam bentuk jasa seperti perbengkelan,*

pembuatan kue dan lainnya. Hambatan dari pelaksanaan program ini yaitu minimnya pendapatan anggaran daerah, kurangnya anggaran terhadap kegiatan pelatihan bisa dibilang kurang sekali, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat mengcover semua usia angkatan kerja untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Padahal kegiatan ini sangat baik untuk menambah skill, sehingga jika kurangnya peluang kerja dengan adanya skill si pencari kerja mampu membuka usaha sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 3. Narasumber ketiga yaitu Ibu Shela Sofya, S.SOS. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kecamatan Baiturrahman, wawancara dilakukan tanggal 06 Juni 2022, beliau mengemukakan pendapatnya “Menurut Badan Pusat Statistik penilaian indikator miskin bukan dari makanan tetapi dari pekerjaan, Aceh merupakan provinsi yang paling termiskin dipulau sumatera. Inti dari pekerjaan adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang, namun kebanyakan masyarakat aceh menilai bahwasanya pekerjaan adalah bekerja dikantor. Atas sebab inilah kurangnya kesadaran masyarakat akan bekerja dan menjadikan angka pengangguran semakin tinggi. Strategi pemerintah salah satunya yaitu BLK tetapi keseluruhan karena menggunakan tes dan belum tentu semua bisa lewat. Pelatihan-pelatihan dikantor keuchik, namun tidak semua*

masyarakat sadar. Sebagai pemerintah kami sudah berusaha semaksimal mungkin namun kadang-kadang sarjana itu tidak mau bekerja jika tidak sesuai dengan bakgroundnya. Kebanyakan dari masyarakat pergi keluar untuk mengembangkan ilmunya diluar kota Banda Aceh sebab di Kota Banda Aceh tidak ada Industri kebanyakan dari mereka adalah adalah ASN, jasa, dan perdagangan. Jika diperlakukan P3K itu mungkin bisa menjadi salah satu program pemerintah yang dapat mengatasi pengangguran sebab dana yang dianggarkan berasal dari daerah. Namun program-program selain pelatihan-pelatihan sejauh ini belum ada program pemerintah di Kota Banda Aceh yang mampu mengatasi pengangguran”.

Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Kota Banda Aceh merupakan kota yang sangat minim perusahaan manufaktur dimana perusahaan dengan pengolahan secara besar masih sangat sedikit, yang banyak hanyalah manufaktur kecil ataupun usaha mikro rumahan serta bidang jasa. Sehingga masalah pengangguran masih juga menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi pengangguran dengan cara yang pertama yaitu menjembatani antara pencari kerja dengan pengusaha agar terjadi kesepakatan kerja, namun kurangnya informasi dan minimnya

pencari kerja yang ikut serta dalam kegiatan ini pada akhirnya kegiatan ini tidak berlangsung dengan maksimal.

Strategi yang kedua yaitu menyelenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan harapan para pencari kerja mempunyai *skill* yang nantinya dapat bersaing di dunia kerja ataupun mampu mendirikan usaha sendiri dengan adanya *skill* yang diperoleh. Namun upaya ini juga belum maksimal sebab keterbatasan anggaran yang ada tidak mampu menyerap semua pencari kerja untuk mengikuti program ini.

Strategi yang sudah pemerintah lakukan memang sudah berusaha sebagaimana mestinya, namun tidak serta merta dapat mengurangi pengangguran. Keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh Balai Latihan Kerja untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan menjadikan pihak BLK sendiri merasa belum maksimal dalam membantu untuk mengurangi masalah pengangguran. Selain itu para pencari kerja jika tidak sesuai *background* pendidikan juga tidak mau bekerja, sehingga setiap tahun angka pengangguran akan semakin bertambah seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan pendidikan.

Apalagi untuk tahun-tahun kedepan program penyelenggaraan CPNS akan dihapuskan dan digantikan dengan P3K dan pegawai honorer akan ditiadakan, maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin tinggi mengingat jumlah honorer di instansi pemerintah dan pendidikan sangat tinggi, memang adanya P3K bisa menyerap tenaga kerja namun terkhusus bidang

pendidikan yang kuotanya cukup tinggi tidak dengan bidang-bidang tenaga teknis yang masih sedikit. Namun meski jumlahnya banyak tetap saja belum mampu menyerap semua jumlah pengangguran.

4.3.1 Pendapat Masyarakat Mengenai Kebijakan Yang Sudah Dilakukan oleh Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran

Masyarakat mempunyai peran penting dalam turut serta memajukan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian suatu daerah. Penghasilan utama suatu daerah adalah adanya pembayaran pajak dari masyarakat yang berjalan lancar dan baik. Untuk itu masyarakat sangat berharap pemerintah mempunyai program-program yang mampu membantu segala kelukesan masalah dalam kehidupan salah satunya yaitu, pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Banda Aceh peneliti mewawancarai 3 orang narasumber. Berikut hasil wawancara antara dengan para pakar instansi pemerintah yang dijadikan narasumber :

1. Narasumber Pertama yang peneliti wawancarai adalah Rahmatunnisa Djulihardy merupakan Seorang Fresh Graduate yang sedang mencari pekerjaan, wawancara dilakukan tanggal 7 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa *“pengangguran terjadi karena adanya*

ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja, selain itu juga adanya persaingan yang ketat antara fresh graduate (mahasiswa baru lulus) dengan yang lebih berpengalaman. Katakanlah salah satu kebijakan pemerintah nya adalah menciptakan lapangan kerja, menurut saya yang selama ini saya alami (sesuai dengan pengalaman saya) masih kurang efektif, karena perbandingan antara lapangan kerja dengan pencari kerja yang tidak sebanding, kemudian juga ada lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh (atau lintas jurusan) ,Jika kebijakan dari pemerintah daerah salah satu nya adalah memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja, saya akan ikut serta dalam pelatihan tersebut, karena menurut saya pemberian pelatihan bersertifikat akan sangat membantu si pencari kerja, karena si pencari kerja yang sudah memiliki sertifikat atau keahlian melalui pelatihan bersertifikat pasti akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk kebijakan yang sudah ada mungkin bisa dikatakan sudah lumayan, akan tetapi tidak signifikan atau tidak terlalu terlihat perubahannya, karena adanya hambatan yang dihadapi pada saat melakukan penanggulangan pengangguran”.

2. Narasumber Kedua yang peneliti wawancarai adalah Teuku Ulul Azmi merupakan Seorang Karyawan Swasta yang, wawancara dilakukan tanggal tanggal 7 Juni 2022, yang

menyatakan pendapatnya bahwa *“Menurut saya, faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran salah satunya adalah kurangnya lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat atau calon pekerja yang melebihi kapasitas lapangan pekerjaan. Kurang efektif, dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan jurusan calon pelamar dan tingkatan Pendidikan yang diminta terlalu tinggi. Masih kurangnya kebijakan yang dilakukan Pemerintahan, seharusnya Pemerintahan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja dengan menciptakan proyek magang yang mana akan sangat berguna untuk calon tenaga kerja dan menciptakan pelatihan – pelatihan sertifikasi khusus yang sangat dibutuhkan didunia kerja. Saya pribadi merasakan sudah adanya perubahan tetapi tidak terlalu menonjol, dikarenakan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia”*.

3. Narasumber Ketiga yang peneliti wawancarai adalah Bapak H. Fauzi Oesman,SH. Merupakan Seorang Kepala Desa Gampong Neusu Aceh yang, wawancara dilakukan tanggal tanggal 7 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa *“ Dalam menanggulangi pengangguran memang ada upaya seperti contohnya untuk dikampung-kampung adalah pembangunan kedai kampung namun hak-hak dan kewajiban harus dipenuhi namun masyarakat kita hanya sekitar 10 persen yang ikut berperan dalam program tersebut. Untuk itu*

kebanyakan pengangguran tidak hanya terjadi dikota saja namun di kampung-kampung pengangguran masih saja ada, karena setiap tahunnya lulusan sekolah tingkat SMP ataupun SMA ada saja yang berhenti sekolah dan memilih tidak melanjutkan sekolah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran terjadi karena ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada baik itu dari pengusaha swasta ataupun dari instansi pemerintah itu sendiri. Selain itu syarat utamanya background pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan banyak yang tidak sesuai dengan pendidikan si pencari kerja dan juga pengalaman juga menjadi syarat yang dominan dalam kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Pengangguran tidak hanya terjadi dikota-kota saja namun diperkampungan juga masih banyak, untuk program pemerintah yang sudah diterapkan diperkampungan yaitu salah satu contoh dengan dibukanya pembangunan kedai – kedai (toko kecil) dengan tujuan agar masyarakat yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan dapat membuka usaha, namun adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin bergabung, maka hanya sekitar 10 persen saja masyarakat kampung yang ikut bergabung.

Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran memang sudah diupayakan namun masih kurang efektif, meskipun sudah ada seperti program pelatihan namun belum dapat meminimalisasi

jumlah pengangguran. Harapan masyarakat pemerintah bisa menciptakan program pemagangan untuk para pengangguran agar mereka mempunyai kegiatan dan mengasah *skill* didunia kerja.

4.3.2 Peran Akademisi Dalam Menciptakan Lulusan Kerja Yang Mampu Bersaing Di Dunia Kerja

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Menurut Undang-Undang NO. 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mengetahui peran akademisi dalam menciptakan lulusan kerja yang mampu bersaing di dunia kerja, maka berikut hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yang bekerja di dunia pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

1. Narasumber Pertama yang peneliti wawancarai adalah Bapak merupakan Dr.H.Muhammad Zuhilmi, M.A. Selaku Wakil Dekan II di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dilakukan tanggal 12 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa *“Pendidikan memengaruhi faktor pengangguran, karna menjadi salah satu tolak ukur untuk mendapatkan pekerjaan, dan peran pendidikan sangat penting untuk*

mendapatkan pekerjaan, mau itu bekerja untuk pemerintahan (ASN) atau bekerja sebagai karyawan dari perusahaan swasta dan bisa juga menciptakan peluang kerja untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan ilmu yang sudah di pelajari dengan cara mengimplementasikannya. Perbanyak relasi dengan lembaga dan ikut serta dalam pelatihan atau pun seminar yang tersebar di sosial media, dengan begitu dapat membangun skill untuk dapat bersaing dengan orang lain. Peran akademisi disini juga sangat membantu untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan relasi yang sudah terbangun dan memiliki data analisa untuk pasar yang dibutuhkan”.

2. Narasumber Kedua yang peneliti wawancarai adalah Ibu Winy Dian Safitri merupakan Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam bidang Ilmu Ekonomi, dilakukan tanggal tanggal 12 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa “ *Membuat sumber daya yang berkualitas itu penting, karna dapat bersaing di dalam dunia kerja dan memiliki sumber daya yang berkualitas dan unggul dapat mengurangi angka pengangguran. Peran pendidikan itu penting, karna orang yang berpendidikan itu mampu atau memiliki pola pikir baik, dia akan mampu membuka peluang kerja untuk dirinya sendiri atau pun orang lain, dan itu dapat mengurangi angka pengangguran. Dan peran akademisi sendiri seharusnya memberikan materi materi yang dibutuhkan di pasar*

lapangan kerja, karna dengan begitu, ilmu yang di pelajari akan langsung di implementasikan di dunia kerja, dan untuk lulusan baru diharapkan dapat menciptakan lowongan kerja atau mengembangkan ilmu" yang sudah dipelajari maka dari itu diharapkan bawahsannya berkerja itu tidak harus sebagai ASN, tapi di zaman modern sekarang, kita bisa kerja dimana saja dengan santai yang biasa di sebutnya freelance”.

3. Narasumber Ketiga yang peneliti wawancarai adalah Ibu Dr.Nilam Sari, LC, M.Ag, merupakan Kaprodi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dilakukan tanggal tanggal 12 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa *“Apakah pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran? : 'sebagian besar iya, sebab dengan tinggi nya pendidikan akan mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau pendidikan nya katakan lulusan SMP, mau mencari kerja dimana mana agak susah, misalnya saya ada buka usaha yang tidak berkaitan secara langsung dengan pendidikan, kalau ditempat saya sedikit profesional saya akan cari pekerja yang minimal lulus S1, tapi kalau lulusan SMP / SD walaupun menarik secara fisik tapi secara kemampuan belum memuhi syarat dalam bekerja. Jadi kalau ditanya pendidikan berpengaruh apa tidak, boleh dikatakan berpengaruh walaupun tidak 100% seperti itu'. Pendidikan itu mendidik seseorang untuk memiliki skill untuk dia bekerja, oleh karena*

itu ketika seseorang sudah memiliki skill, maka peluang dia bekerja itu semakin besar, dan peluang dia menjadi pengangguran semakin kecil. Peran akademisi sekedar mengimbuu saja untuk mahasiswa, agar aktif dalam belajar, aktif dalam melakukan kajian pendidikan, sehingga dia memiliki skill dengan pengetahuan dengan pelajaran yang sudah dia ikuti, kalau untuk menciptakan lapangan kerja akademisi ini susah, karena kami hanya sebagai pengajar, ini kebijakannya ditingkat pemerintah yang punya kedaulatan punya akses untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, jadi kalau akademisi ini hanya sebagai penghimbau saja' Selain itu peran untuk mendapatkan pekerjaan bagi lulusan yaitu mungkin dengan memberikan informasi kepada yang bersangkutan, siapa tau akademisi ini punya banyak link, katakanlah dosen FEBI ini memiliki link dengan perbankan, kemudian ini sedikit bisa memberikan informasi tambahan pada mahasiswa untuk bisa bekerja disana, yaa bisalah memberikan canel atau link ke mahasiswa yang bersangkutan, atau mungkin dosen yang punya skill untuk mendidik lulusan untuk lebih siap dalam lapangan kerja”.

4. Narasumber Keempat yang peneliti wawancarai adalah Bapak Muhammad Arifin, Ph.D merupakan Ketua LAB FEBI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dilakukan tanggal 12 Juni 2022, yang menyatakan pendapatnya bahwa

“Apakah pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran? : 'Saya pikir iya, pendidikan menjadi salah satu faktor dari faktor faktor yang lain, kesempatan yang disediakan oleh pemerintah tidak kalah banyak dengan pengangguran, karena kita liat sekarang banyak ya pengangguran dari lulusan SI juga ramaikan hari ini, jadi kalau ditanya pendidikan berpengaruh atau tidak, menurut saya berpengaruh ya berpengaruh. Sebetulnya definisi dari bekerja itu harus diluruskan ya, apakah income dari bekerja itu dikhususkan dipekerjaan formal atau non formal, dan memang sebaiknya mindset dari lulusan sarjana khusus nya juga di FEBI jangan berfikir kalau bekerja itu hanya di sektor formal dan bekerja kepada orang, tapi hal yang sama adalah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas, saya pikir ini adalah satu hal yang mulia, dengan memberikan kesempatan pekerjaan terhadap orang lain, karena kita liat sekarang banyak PNS sangat dibatasi penerimaannya, dan juga perusahaan yang ada di Indonesia kan banyak yang kita lihat dengan perekonomian yang tidak cukup baik. Dalam hal membantu mendapatkan pekerjaan bagi lulusan, Prodi ini perlu menyiapkan kurikulum kepada mahasiswa nya yang nanti dipikirkan kurikulum itu akan berguna pakai, terutama nya sekarang pak Nadim ya, merdeka belajar kampus merdeka, nah sekarang kurikulum itu sedikit sedikit sudah dimasukan ke kurikulum ekonomi

syariah yang mana nanti nya alokasi waktu kepada mahasiswa akan banyak diimplementasikan diperusahaan perusahaan, artinya magang nya itu akan lebih banyak waktunya, jadi diharapkan dengan demikian mahasiswa nya juga mempunyai gambaran dan paham nanti setelah ini akan kerja disini dan bagaimana, selain itu juga wirausaha juga hal yang sama menjadi konsentrasi prodi sesuai program pemerintah”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memang sangat berpengaruh dalam memperoleh kesempatan bekerja karena dengan pendidikan yang lebih tinggi pola pikir seseorang tentu akan menjadi lebih baik. Jika tidak menjadi pekerja bisa saja mendirikan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam hal ini tidak serta merta pendidikan rendah tidak bisa mendapatkan pekerjaan, karena orang dengan pendidikan rendah biasanya mereka mau bekerja dibidang apasaja.

Indikator dari seorang itu bekerja bukan hanya bekerja di suatu perusahaan ataupun menjadi ASN, tetapi lebih kepada adanya *income* yang masuk untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup. Untuk sekarang ini dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan, harusnya tidak hanya terpaku mendapatkan pekerjaan didunia industri maupun pemerintahan, bisa saja memperoleh pekerjaan di dunia *freelance* asalkan para lulusan mau berusaha untuk memperoleh penghasilan.

Peran akademisi dalam upaya mengurangi menciptakan lulusan kerja yang siap bersaing didunia kerja tidak sepenuhnya mampu sebab akademisi hanya bertugas mendidik untuk memiliki skill yaitu dengan ilmu yang tertuang dalam mata kuliah yang sudah tersusun dikurikulum yang ada dan menghimbau mahasiswa agar aktif belajar supaya agar nanti sudah lulus mereka mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan sesuai kebutuhan agar dapat memperoleh pekerjaan ataupun mendapat income untuk kebutuhan hidup.

Tidak hanya itu untuk dalam hal memperoleh pekerjaan akademisi sudah berupaya dalam hal perkuliahan diterapkan sistem magang, dengan tujuan mahasiwa akan terbiasa dengan dunia kerja, seperti halnya kampus merdeka yang kedepannya akan diterapkan, nantinya didalam kurikulum tersebut akan lebih banyak waktu mahasiswa dalam dunia magang. Jika mahasiswa mempunya ketrampilan yang baik pada saat pemagangan besar kemungkinan jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka mahasiswa dengan ketrampilan dan *skill* yang baik tersebut dapat ditarik ikut bergabung dalam perusahaan ketika sudah menamatkan kuliahnya.

4.4 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kewenangan desentralisasasi pada dinas daerah yang mempunyai wilayah kerjasama di beberapa kecamatan untuk memberdayakan masyarakat sebagai wujud

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pengangguran juga menjadi salah satu tugas yang harus dituntaskan. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengurangi jumlah pengangguran, maka terselenggara Peraturan Menteri (PERMEN) No. 07 Tahun 2008 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan secara konvensional bahwa merupakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan menjelaskan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantara kerja.

Dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber baik narasumber yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sampai dengan saat ini pemerintah sudah berusaha dengan berbagai macam bentuk kegiatan guna menanggulangi pengangguran seperti, adanya kartu pencari kerja, pelatihan di Balai Latihan Kerja dan sebagai narahubung bagi para pencari kerja dengan pengusaha, namun meskipun hasil yang diharapkan masih jauh dari kata sempurna, sebagai masyarakat kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian dengan berusaha mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota Banda Aceh.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk agama Islam tentu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan termasuk dalam salah satu tujuan ekonomi Islam yaitu *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Salah satu aktivitas yang membawa *mafsadah* adalah bekerja agar segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup memang bukan sepenuhnya kewajiban pemerintah tetapi, merupakan tanggung jawab kepala keluarga, sebab barang-barang pokok tidak mungkin datang sendirinya tanpa perlu dicari. Islam mendorong agar manusia bekerja, mencari rizki dan berusaha. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

“Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, makan berjalanlah disegala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya (QS.Al-Mulk :15).

Pada kitab *Tafsir al-Misbah* karangan Quraish Shihab tertulis bahwa Allah lah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita akan dibangkitkan untuk diberi balasan. Maksudnya, berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya.

Meskipun bumi itu bulat, dan terus menerus berputar, namun Allah SWT tetap memudahkan kita untuk tetap bisa menjelajah tanpa mengkhawatirkan peredaran bumi yang terus berputar. Sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman, bahwa sahabat Umar bin Khatab pernah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda:

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung”.

Maksudnya ialah burung ketika pergi di pagi hari dengan keadaan lapar, kemudian pada saat pulang tepatnya pada petang hari, burung tersebut sudah dalam keadaan kenyang. Selanjutnya

lafaz *Dzaluul* pada ayat 15 surat al-mulk adalah mufrad, jamaknya *dzulul*. Berasal dari kata *adz dzillah* atau *dzalla-yadzullu* yang berarti rendah, hina, tunduk, patuh, belas kasihan, mudah dan sebagainya. Al Husain bin Muhammad Ad Damaaghani mengatakan bahwa lafadz *dzaluul* di dalam Al Qur'an mengandung beberapa makna, yaitu *tawaddu'*, lemah lembut, kehinaan, terbentang dan terbelenggu.

Dalam *Safwah At- Tafasir*, *dzaluul* pada ayat ini bermakna lunak dan mudah dijadikan tempat berjalan. Kemudian jika pada *tafsir Al Azhar*, *dzaluul* diartikan dengan rendah, maknanya bumi rendah di bawah kaki manusia atau di bawah pijakan manusia. Maka, bagaimanapun tingginya gunung, apabila manusia mendakinya, namun puncak gunung itu tetap terletak di bawah kaki manusia juga. Berkelana atau pun menjelajah bumi adalah menjadikan semakin jelas bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, kecuali bentuk kekuasaan Allah dan dapat berakhir juga karena kehendak Allah. Menjelajah juga sangat positif, selain memang sangat dianjurkan dalam al-Quran. Dengan menjelajah, manusia diharapkan akan semakin bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah serta pelajaran dari berbagai kejadian yang dihadapinya di perjalanan.

Dengan begitu, menjelajah bumi akan menemukan kebesaran Allah, pengetahuan luar biasa, berbagai macam ilmu hidup serta mampu memahami hakikat kehidupan, dan menyadari atas perihal kefanaan dunia, segala sesuatu tidak terlepas dengan kehendak

Allah SWT. Bahkan selai itu juga, lebih merasuk dalam memahami ayat-ayat Allah sehingga kita akan senantiasa menunduk bertasbih dan khusyuk kepada Allah. Dan tentunya Allah SWT memberikan kelimpahan rezeki melalui bentuk kekuasaanya yaitu bumi. Dalam Al Qur'an Allah Ta'ala berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Artinya dia sedang tidak ada di masjid, dia sedang ada kesibukan namun hatinya senantiasa merindukan masjid, rindu kapan dikumandangkan adzan agar bisa pergi ke masjid. Dalam Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis; carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik. Ayat sebelumnya mengingatkan orang-orang beriman agar kembali bekerja mencari rezeki yang halal apabila sudah melaksanakan salat Jumat. Ayat ini menegur kaum muslim yang meninggalkan Rasulullah ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat untuk berburu barang dagangan.

Mereka, orang-orang beriman yang sedang menyimak khutbah Jum'at, melihat perdagangan, kafilah dagang yang membawa barang-barang berharga tiba di Madinah atau permainan, hiburan musik dan tari yang diselenggarakan guna menyambut kafilah dagang yang baru tiba dari Syam, mereka, sebagian besar orang-orang yang sedang menyimak khutbah Jumat itu, segera menuju kepadanya, ke tempat kafilah dagang dan hiburan itu; dan mereka meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri, menyampaikan khutbah Jumat. Katakanlah, wahai Muhammad kepada mereka ? Apa yang ada di sisi Allah, kenikmatan surga yang diberikan kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik daripada permainan, hiburan, musik dan tari, dan perdagangan barang-barang berharga yang dicari dan disukai manusia.? Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik kepada setiap manusia. Dalam Al Qur'an Allah Ta'ala berfirman,

فَأَنْصَبْ فَرَعْتَ فَإِذَا

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

Dengan demikian, ayat ini meminta kita untuk selalu melakukan kegiatan apa yang telah kita lakukan secara teratur dengan pekerjaan lain. Dengan kata lain, harus menjadi pribadi yang produktifitas. Produktivitas di sini melakukan aktivitas yang dapat ditingkatkan setiap hari. Tentunya dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, ayat ini ingin agar kita tidak menjadi pengangguran. Pengangguran berarti tidak memiliki rencana untuk

melakukan apapun. Dengan demikian, waktu kita terbuang sia-sia atau kita akhirnya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna yang tidak membawa manfaat bagi kita.

Juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”. Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah saw bersabda : *“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Al-Badri (1992), menceritakan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ra. memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT. Umar ra lalu bertanya : *“Apa yang sedang kalian kejakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja? Mereka menjawab :“Ya Amirul Mukminin,*

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra, seraya berkata :“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka :“Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah”.

Ayat-ayat Al-Quran diatas menjelaskan kepada kita bahwasanya mencari nafkah merupakan tugas dari masing-masing individu itu sendiri. Namun minimnya peluang kerja di Kota Banda Aceh menjadikan peran pemerintah turut menjadi sorotan untuk mampu membantu memfasilitasi para angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasulullah Saw Bersabda :

“Seseorang Imam adalah pemeliharaan dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR.Bukhari dan Muslim).

Atas dasar inilah maka para ulama mengatakan bahwa wajib atas *Waliyul Amri* (pemerintah) memeberikan sarana dan prasarana kepada para pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan. Menciptakan lapangan kerja merupakan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat yang telah ditetapkan

secara syar'I dimasa masa kejayaan dan kemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, membahas dan menguraikan tentang masalah bagaimana “Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh terus meningkat dan belum bisa berada dibawah nilai angka pengangguran nasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Terjadinya pengangguran di Kota Banda Aceh disebabkan oleh minimnya industri manufaktur yang berskala besar yang mampu menampung banyaknya jumlah pencari kerja, kebanyakan di Banda Aceh didominasi oleh sektor jasa.
2. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pemberian anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur terutama pada bidang pendidikan salah satunya dalam pembangunan sekolah kejuruan yang memberikan pemahaman mengenai dunia kerja yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, dan juga mengenai bagaimana pembangunan pendidikan ini sebagai penggerak indeks pembangunan manusia yang ada. Kemudian pemberian dana untuk UMKM yang diberikan oleh LKMS (Lembaga Keuangan Mikro

Sayriah) yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sudah dilakukan semaksimal mungkin untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah seperti diadakannya pelatihan, namun keterbatasan anggaran dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan menjadi salah satu faktor yang membuat kegiatan ini tidak berjalan seefektif yang diharapkan karena tidak mampu menampung kuota dari banyaknya orang yang membutuhkan.

3. Upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena telah sesuai dengan prinsip tujuan ekonomi Islam yaitu kemaslahatan bagi umat manusia dengan diadakannya kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat yaitu, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengurangi pengangguran seperti diadakannya pelatihan di Balai Latihan Kerja dengan tujuan untuk menambah skill para pencari kerja agar mempunyai kemampuan dibidang yang diminatinya, walaupun tidak bekerja di sebuah perusahaan mereka bisa mendirikan usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mendukung program ini beberapa hal penulis ajukan sebagai saran

atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak terkait untuk menunjang keberhasilan program ini yaitu:

1. Kepada pihak akademisi sebagai pelopor pendidikan tingkat tinggi diharapkan agar kedepannya kurikulum tentang mata kuliah mampu menjadi salah satu sarana yang dapat mengembangkan lebih lebar lagi skill mahasiswa dan mahasiswi agar setelah lulus mereka tidak hanya siap untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan akan tetapi, mempunyai jiwa wirausaha.
2. Kepada pihak pemerintah yang sudah berupaya menanggulangi pengangguran, perlu kiranya untuk melakukan upaya-upaya lainnya agar angka pengangguran setiap tahunnya selalu bertambah. Seperti contoh dengan diadakannya program magang dan pelatihan yang lebih dapat menampung banyak kuota lagi. Seperti yang kita lihat sampai dengan saat ini program tersebut belum bisa menampung banyak peserta.
3. Kepada masyarakat khususnya yang masih dalam upaya mencari pekerjaan, hendaknya agar jangan terpaku untuk memperoleh kerjaan saja namun mempunyai jiwa wirausaha juga, agar nantinya mampu membuka usaha meskipun usaha tersebut hanya skala kecil, namun mampu mencukupi kebutuhan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, F., & Pujiyono, A. (2011). *Analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(2), 158-169.
- Abdain, A. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, 4(2), 15-26.
- Badan Pusat Statistik. 2015. <https://aceh.bps.go.id/indicator/6/155/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>. Diakses tanggal 28 November 2021
- Badan Pusat Statistik 2021. <https://bandaacehkota.bps.go.id/statictable/2021/08/27/202/-jumlah-pencari-kerja-belum-ditempatkan-oleh-dinas-tenaga-kerja-menurut-pendidikan-dan-jenis-kelamin-di-kota-banda-aceh-2020.html>. Diakses tanggal 08 Juli 2022
- Bappeda Kota Banda Aceh. 2020. <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/03/RPJMD-KOTA-BANDA-ACEH-TAHUN-2017-2022.pdf>. Diakses tanggal 08 Juli 2022
- Bappeda Kota Banda Aceh.2020. <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/tkpk-lp2kd/>. Diakses Tanggal 08 Juli 2022.
- Fatimah, R. M., & Syahnur, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).
- Gunawan, G. (2017). Analisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 7(1).
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.

- Hia, Y. D. (2013). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208-213.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). Metodologi penelitian bisnis. Yogyakarta. *BPFF: Yogyakarta*.
- JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>. Diakses tanggal 08 Juli 2022.
- Khoe, F. N. (2013). Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Calyptra*, 2(1), 1-12.
- Lelau, A. (2013). Kebijakan Pemerintah Tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 6(11b).
- Mariono, B. P., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2017). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 1(1), 25-36.
- Mustaqim, Abdul.(2020). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*. Vol.21.NO.1 Januari 2020.
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Murahman, M., & Hayati, A. (2021). Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau. *Jurnal PASira*, 4(1), 7-19.
- Rusby, Z. 2017. Ekonomi Islam. Pekan baru : Pusat kajian pendidikan Islam FAI UIR.
- Safarni, Y., & Dayyan, M. (2016). STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN. *At-Taqfir*, 9(1), 42-64.

- Sugianto, S., & Yul, Y. T. P. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Ikraith-Ekonomika*, 3(2), 54-63.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis. Bandung : Cv.Afabeta.
- Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru.
- Susana, S. L. R. R. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 56-70.
- Subhan, M. (2018). Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2).
- Sutjipto, H. (2003). Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(4), 425-444.
- Taime, H., & Djaelani, P. N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 54-66.
- Qaradhawi, Y. 2005. Spektrum Zakat. Jakarta : Zikrul Hakim.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Daftar Wawancara

Pertanyaan untuk Akademisi

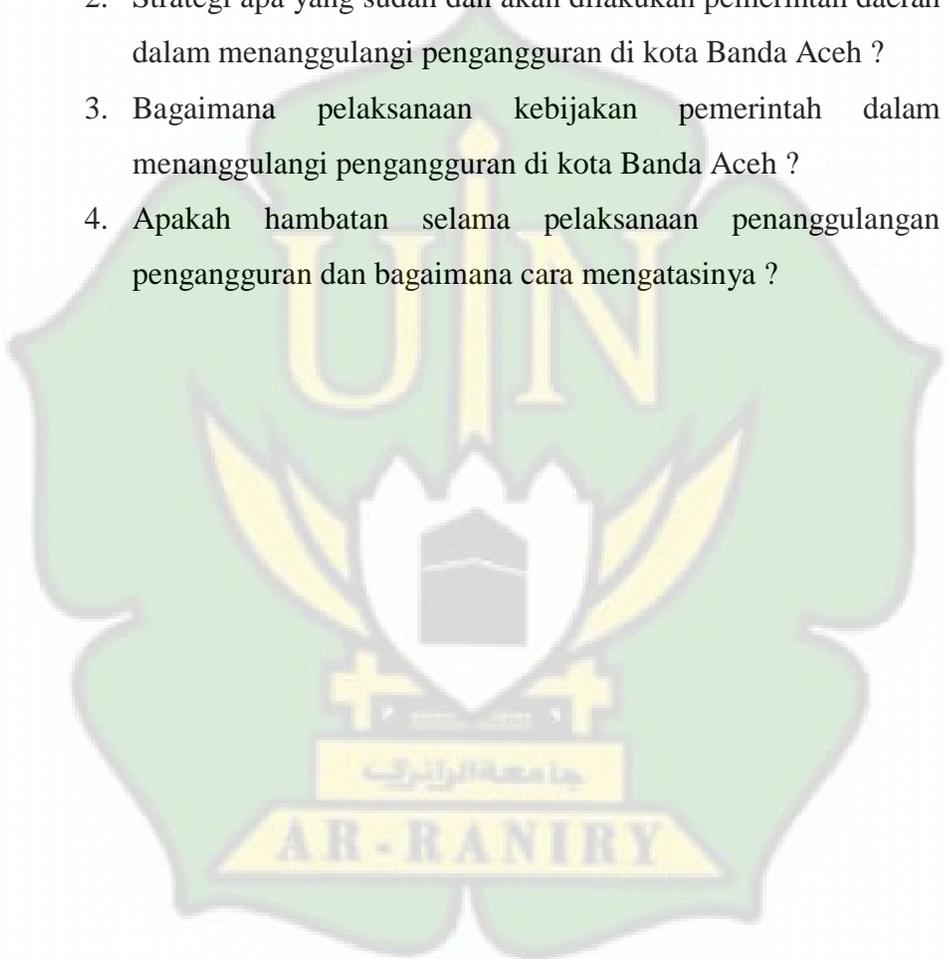
1. Apakah pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran ?
2. Bagaimana peran Pendidikan terhadap terjadinya pengangguran ?
3. Bagaimana langkah akademisi dalam menciptakan lulusan kerja mampu bersaing didunia kerja ?
4. Bagaimana peran akademisi dalam membantu lulusan baru mendapatkan kesempatan kerja ?

Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai factor utama yang menjadi sebab terjadinya pengangguran ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran ?
3. Bagaimana langkah yang anda lakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran ?
4. Apakah anda merasakan perubahan dari kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran?

Pertanyaan Untuk Instansi Pemerintah

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di kota Banda Aceh ?
2. Strategi apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di kota Banda Aceh ?
4. Apakah hambatan selama pelaksanaan penanggulangan pengangguran dan bagaimana cara mengatasinya ?



Beberapa Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Informa



